

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Program Jalin Matra

1. Program Jalin Matra Secara Umum

Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Provinsi Jawa Timur memiliki program unggulan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera atau biasa disebut Jalin Matra dalam pengentaskan kemiskinan daerah. Jalin Matra adalah sebuah program yang secara khusus didesain bagi masyarakat yang kurang beruntung secara sosial, ekonomi, dan budaya (*wong cilik*) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).¹ Adapun acuan dalam pelaksanaan program di tahun 2019 adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur.

2. Jenis Kegiatan Program Jalin Matra

Program Jalin Matra ini terbagi ke dalam 3 kegiatan dengan sasaran berbeda. Tiga kegiatan yang menjadi unggulan program ini yaitu:

- a. Jalin Matra dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin dengan status kesejahteraan 1 – 5% terendah (Desil 1).

¹ Pedoman Umum Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2019, hal. 4

- b. Jalin Matra PFK dengan sasaran KRTP dengan status kesejahteraan 1 – 10% terendah (Desil 1).
- c. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dengan sasaran Rumah Tangga Rentan Miskin dengan status kesejahteraan 11 – 30% terendah (Desil 2 dan 3).

B. Program Jalin Matra PFK

1. Pengertian Jalin Matra PFK

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) adalah turunan dari program Jalin Matra dengan sasaran khusus masyarakat miskin (perempuan) yang berperan sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). KRTP adalah seorang perempuan yang menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga karena suatu hal/penyebab. Jalin Matra PFK menggunakan konsep pemberdayaan dimana para KRTP diharapkan dapat secara mandiri memanfaatkan bantuan modal produktif untuk usaha ekonomi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan program ini bermaksud agar penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan KRTP lebih optimal dan efektif.

2. Tujuan Jalin Matra PFK

Adapun tujuan Jalin Matra PFK antara lain :²

- a. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP

² *Ibid.*, hal. 9

melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi KRTP.

- b. Memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha/pendapatan keluarga.
- c. Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
- d. Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

3. Prinsip Dasar Jalin Matra PFK

Prinsip dasar dalam sebuah program penting guna mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip dasar dari Jalin Matra PFK yaitu:³

1) Membantu dengan Hati

Program Jalin Matra PFK merupakan implementasi Pemprov Jatim terhadap kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak dasar warga miskin khususnya pada sasaran program ini yang masuk dalam kriteria KRTP. Selain itu untuk menghormati dan melindungi mereka agar dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap dapat berdaya dan keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, pelaksanaan program berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan *social compassion*.

³ *Ibid.*, hal. 10-12

2) Partisipatoris *Deliberatif*

Rumah tangga sasaran selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai jenis usulan kebutuhan dengan komunikasi secara langsung tentang aspirasi dan kebutuhan yang diinginkan untuk meningkatkan taraf hidup. Musyawarah dan mufakat melalui “*Rembug Warga*” ditekankan pada *stakeholder* dalam pengambilan keputusan tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi KRTP. Kesadaran partisipatoris dari KRTP dapat menumbuhkan pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) manfaat bantuan yang diterima dalam mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

3) Perspektif Gender

KRTP yang menjadi sasaran Program Jalin Matra PFK ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan posisi sebagai pelaku (*subyek*) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, dan kearifan lokal.

4) Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan Jalin Matra PFK secara transparan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah

disepakati. Program ini membuka akses publik dalam memberikan kritik atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

5) Keterpaduan

Berbagai unsur dilibatkan dalam pelaksanaan Jalin Matra PFK sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi Pendamping, Tenaga Pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

6) Keberlanjutan (*Sustainability*)

Pada dasarnya Jalin Matra PFK merupakan penggerak ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya. Peran aktif semua pihak dilibatkan dalam upaya menjaga kelestarian program, tidak hanya oleh KRTP sebagai pengelola usaha, namun juga Pemerintah Daerah/Desa serta *Mother Care* Desa.

3. Kriteria Sasaran Program

Acuan dalam menentukan kriteria sasaran Jalin Matra PFK adalah Basis Data Terpadu PPFM 2015, kriteria sasaran yang dimaksud yaitu:

- a. Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) Basis Data Terpadu PPFM 2015.
- b. Rumah tangga dengan KRTP.

- c. KRTP yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) produktif dengan usia antara 15 – 65 tahun dan atau KRTP sebatang kara produktif .
- d. Diprioritaskan Desa dengan KRTP minimal 10 Rumah Tangga.

Rumah Tangga Sasaran yang memenuhi kriteria tersebut kemudian dipilah lagi dengan kriteria KRTP sebagai berikut :⁴

- a. Bercerai.
- b. Suami meninggal.
- c. Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan).
- d. Suami difabel atau sakit menahun dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif.
- e. KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha.
- f. *Non Marital Single Mother*

Adapun kriteria KRTP yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan, apabila:

- a. KRTP dimaksud telah menikah lagi.
- b. KRTP meninggal dunia/ pindah.
- c. Berdasarkan hasil rebug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kades dan Pendamping Desa terpilih.

⁴ *Ibid.*, hal.15

- d. Menolak bantuan.
- e. Telah menerima bantuan dari program Jalin Matra yang lain (BRTSM atau PK2) baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

4. Mekanisme Pelaksanaan Jalin Matra PFK

Adapun mekanisme pelaksanaan Jalin Matra PFK sesuai PEDUM terdapat beberapa tahapan, yaitu:⁵

1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk memberi penjelasan tentang kegiatan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).

2) Pra Rembug Warga

Pra rembug warga merupakan pertemuan khusus yang bertujuan untuk membentuk dan menetapkan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa. Pemerintah desa difasilitasi Pendamping Kabupaten/ Kota dan Tim Fasilitasi Kecamatan dalam mempersiapkan organisasi pengelola di tingkat desa dan persiapan kegiatan rembug warga.

3) Rembug Warga

Rembug Warga merupakan media sosialisasi Jalin Matra PFK ditingkat Desa. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Jalin Matra PFK. Dalam Rembug

⁵*Ibid.*, hal 35-45

Warga juga dilaksanakan verifikasi untuk mendapatkan data KRTP yang aktual dan faktual dari Basis Data Terpadu PPFM 2015. Pemerintah Desa, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Kabupaten/ Kota memfasilitasi Sekretariat Desa dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

4) Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan KRTP dilakukan untuk mengecek kondisi riil/faktual KRTP serta mendalami jenis kebutuhan KRTP yang berpotensi untuk dikembangkan. Pendamping Desa mendatangi dan berinteraksi langsung dengan KRTP sasaran serta mengisi form instrumen klarifikasi dan identifikasi kebutuhan.

5) Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus

Pemerintah Desa menyusun berkas pengajuan pencairan yang akan diserahkan kepada DPMD Kabupaten yang kemudian dokumen tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi.

6) Rembug Pokmas Persiapan Realisasi Bantuan

Rembug Pokmas adalah forum pertemuan untuk melakukan *review* rincian usulan kebutuhan KRTP. Pendamping Desa memfasilitasi kegiatan ini dengan mendatangkan KRTP penerima/pengelola usaha. Usulan kebutuhan usaha *direview* kembali jika ada perubahan usulan kebutuhan disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku. Hasil *review* rincian usulan kebutuhan KRTP ini menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk merealisasikan bantuan barang.

7) Pengadaan Barang KRTP

Pengadaan barang bantuan disesuaikan dengan hasil final identifikasi kebutuhan KRTP. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

8) Penyerahan Barang Bantuan kepada KRTP

Penyerahan barang bantuan dilakukan Pemerintah Desa kepada KRTP difasilitasi oleh Sekretariat Desa. Pendamping Desa memantau dan mendampingi keberlangsungan kegiatan ini. Penyerahan bantuan pada setiap KRTP didokumentasikan satu persatu disertai bukti tanda terima barang.

9) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis bertujuan untuk memberi penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada KRTP penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan. Bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi, Kabupaten, Desa, SKPD terkait, dan atau *stakeholder* dengan dibantu Pendamping Kabupaten. Sasaran kegiatan ini adalah KRTP, Pendamping Desa, dan/atau stakeholder di tingkat Desa.

10) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan Jalin Matra PFK terdiri dari pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban administrasi dilakukan dengan penyusunan dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan, sedangkan pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rembug warga oleh Pemerintah Desa.

11) Pengelolaan dan Pelestarian Program

Bantuan usaha produktif dikelola secara mandiri oleh KRTP. Pelestarian Jalin Matra PFK dikoordinasikan oleh Sekretariat Desa. Pemerintah Desa diharapkan mengalokasikan program atau kegiatan dalam bentuk pemberdayaan terhadap KRTP.

C. Feminisasi Kemiskinan

1. Pengertian Feminisasi Kemiskinan

Menurut Moghadam, feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan dapat diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi pada perempuan yang telah berkeluarga dan menjadi kepala keluarga.⁶

Feminisasi kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi perempuan yang hidup sendiri atau berstatus sebagai kepala rumah

⁶Agus Wahyudi, "Analisis Kinerja Program Jalin Matra untuk Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur", *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 30

tangga dengan tingkat risiko dan ketidakberuntungan secara sosial lebih besar sehingga mereka mengalami kemiskinan.⁷

Tingginya angka kemiskinan pada perempuan disebut sebagai kondisi feminisasi kemiskinan. Menurut Darwin perspektif gender yang diterapkan dalam melihat kemiskinan tidak berarti mengecilkan arti kemiskinan yang dialami laki-laki, tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan pada perempuan bersifat spesifik, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus.⁸

Schaefer mengungkapkan feminisasi kemiskinan merupakan kondisi perempuan yang mengalami kemiskinan dan harus menanggung beban ekonomi keluarga karena ditinggal pergi, kecacatan, atau kematian suami.⁹

Konsep dasar feminisasi kemiskinan setidaknya merujuk pada dua hal utama. Pertama, mengarah pada kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, baik karena sebagai tulang punggung keluarga, ataupun sebagai orang yang mencukupi kebutuhan dirinya sendiri yang secara kuantitas mayoritas dalam keadaan miskin.¹⁰

2. Karakteristik Feminisasi Kemiskinan

Adapun karakteristik feminisasi kemiskinan yang diungkapkan

⁷ Puji Laksono, "Feminisasi kemiskinan: Studi Kualitatif Pada Perempuan Miskin di Desa Kembar Kelor", *Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal.4

⁸ Muhadjir Darwin, *Negara dan Perempuan : Reorientasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta : Graha Guru, 2005), hal.164

⁹ Puji Laksono, "Feminisasi kemiskinan: Studi Kualitatif...", hal. 4

¹⁰ Welhendri Azwar, et.all., "Feminisasi Kemiskinan: Studi tentang Pengemis Perempuan pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat Indonesia", *Jurnal Musawa*, Vol. 17, No. 2, Juli 2018, hal.168

Chant antara lain yaitu:¹¹

- a. Perempuan mengalami insiden kemiskinan lebih tinggi daripada laki-laki.
- b. Kemiskinan yang dialami perempuan lebih dalam dan ekstrim daripada laki-laki.
- c. Perempuan cenderung mengalami kemiskinan dalam jangka panjang dibandingkan laki-laki.
- d. Perempuan yang menjadi kepala keluarga merupakan orang termiskin di antara orang-orang miskin (*the poorest of the poor*).
- e. Beban kemiskinan perempuan jauh lebih berat dari laki-laki.
- f. Banyak hambatan yang dihadapi perempuan untuk keluar dari kemiskinan.
- g. Perempuan yang menjadi kepala keluarga akan mewariskan kemiskinan kepada anak-anak mereka.

3. Penyebab Kemiskinan pada Perempuan

Ketidakadilan pada perempuan menyebabkan perempuan menderita miskin. Berikut penyebab kemiskinan pada perempuan, antara lain meliputi:¹²

- a. Perempuan sering terlibat dalam pekerjaan pertanian dengan upah rendah.

¹¹ Sylvia Chant, "The Feminisation of Poverty and The Feminisation of Anti-Poverty Programmes: Room for Revision?", *Journal of Development Studies*. Vol. 44, No. 2, Februari 2008, hal.167

¹² Edriana Noerdin dkk, *Potret Kemiskinan Perempuan*, (Jakarta: Women Research Institute, 2006), hal. 24-25

- b. Perempuan kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan.
- c. Perempuan menerima upah lebih rendah dalam pekerjaan yang sama.
- d. Perempuan seringkali kekurangan modal untuk membangun usaha sendiri.
- e. Lebih banyak anak perempuan yang tidak sekolah dibandingkan dengan anak laki-laki.
- f. Perempuan kurang terlibat pembuatan keputusan di keluarga.
- g. Perempuan mempunyai beban berat dalam pekerjaan keluarga.

D. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.¹³ Penyebab keterbelakangan dan kemiskinan dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber *power*. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan *power* pada sebagian besar masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki *power*.

¹³ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 82

Terdapat tiga pandangan dalam pemberdayaan. Adapun pandangan tersebut yaitu :¹⁴

- a. Pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.
- b. Pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan abuse dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri.
- c. Pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*.

¹⁴ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Makasar: CV Nur Lina, 2018), hal. 141

World Bank mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.¹⁵

Kartasmita dalam Rahman Mulyawan menyebutkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep yang relatif baru, dimana masyarakat tidak lagi hanya dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi juga dijadikan subyek dari pembangunannya sendiri.¹⁶

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan alternatif atau pembangunan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan.¹⁷

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk

¹⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Subiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 28

¹⁶ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, (Bandung:UNPAD Press, 2016), hal. 45

¹⁷ Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hal. 67

mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.¹⁸

Totok dan Poerwoko mengartikan pemberdayaan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi kehidupan yang lebih baik.¹⁹ Dengan kata lain pemberdayaan diartikan sebagai upaya dalam memperbaiki mutu kehidupan atau kesejahteraan.

Menurut Mubyarto dalam Totok dan Poerwoko menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (dipedesaan), penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan ekonomi merupakan penguatan faktor-faktor produksi yang dimiliki, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat upah/gaji yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan

¹⁸ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi...*, hal. 141

¹⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Subiato, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 28

keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.²⁰

Dapat dipahami dari banyaknya pengertian diatas bahwa pemberdayaan ekonomi adalah upaya membangun daya masyarakat pada kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki.

Sumodiningrat dalam Aziz dan Hasan mengemukakan konsep pemberdayaan ekonomi sebagai berikut :²¹

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya,

²⁰ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi...*, hal. 143

²¹ *Ibid.*, hal. 145-146

- penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
 - e. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah memberi peluang atau akses yang lebih besar kepada *asset* produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan spasial.
 - f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, pengembangan SDM dan peningkatan akses ke sarana prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

2. Sasaran dan Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia, baik secara perorangan atau kelompok yang rentan dan lemah. Suharto

menjelaskan arah dari pemberdayaan yaitu :²²

- a. Untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*). Kebebasan yang dimaksud disini bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, namun juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang dimungkinkan dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Suharto juga menjelaskan tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karna kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. Kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya sebagai berikut:²³

- a. Kelompok secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti anak-anak dan remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 58

²³ *Ibid.*, hal.60

Adapun tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu:
 - 1) Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integraldari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, antara lain buruh tani, masyarakat terbelakang, masyarakat miskin.
 - 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
- b. Sasaran program pemberdayaan masyarakat diantaranya yakni:
 - 1) Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.
 - 2) Diperbaikinya kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya.
 - 3) Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

²⁴ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaann Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hal. 114-115

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan daya kepada kelompok yang lemah (tidak memiliki keberdayaan) secara sosial ekonomi. Dari pemberian daya tersebut diharapkan nantinya masyarakat dapat lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Program pemberdayaan masyarakat menasar pada kegiatan-kegiatan dalam peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil agar kehidupan masyarakat yang tak berdaya dapat diperbaiki sehingga kelompok dapat berkembang dan dapat meningkatkan produktivitasnya

3. Tahap-Tahap dalam Pemberdayaan

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto menyebutkan setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan, yaitu:²⁵

- a. Penyadaran, yaitu tahap dimana pemberian pencerahan pada sasaran pemberdayaan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu.
- b. Pengkapasitasan (*enabling*), yaitu tahapan untuk memberikan daya kuasa, target atau kelompok sasaran harus mampu lebih dahulu. Misalnya sebelum memberikan suatu pekerjaan, kelompok sasaran harus dilatih terlebih dahulu sebelum mereka cakap (*skillfull*) dalam pekerjaan tersebut. Terdapat tiga jenis proses pengkapasitasan yaitu:
 - 1) Pengkapasitasan manusia, bertujuan agar manusia mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Langkah-

²⁵ Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah ...*, hal. 3-6

langkah pengkapasitasan dapat dilakukan melalui workshop, seminar, pelatihan dan sejenisnya.

- 2) Pengkapasitasan organisasi, bertujuan menyediakan medium bagi masyarakat. Adapun langkah yang dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi penerima daya atau kapasitas tersebut. Misalnya, sebelum diberikan peluang usaha bagi kelompok miskin dibuatkan badan usaha milik rakyat.
 - 3) Pengkapasitasan sistem nilai, dilakukan dalam bentuk membuat aturan. Sistem nilai bisa berupa sistem dan prosedur peraturan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan sejenisnya. Pengkapasitasan sistem nilai penting agar tidak terjadi sengketa yang akhirnya menimbulkan kerugian.
- c. Pemberian daya, yaitu tahapan dimana kelompok sasaran diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Rukminto Adi juga mengenalkan tahapan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, yaitu:²⁶

- a. Tahap persiapan, tahap ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:
 - 1) Persiapan petugas, tahap ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

²⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 206-207

- 2) Persiapan lapangan, dilakukan oleh petugas melalui studi kelayakan pada daerah sasaran. Pada tahap ini terjadi kontak dan kontrak awal dengan kelompok sasaran. Kontak awal ini harus tetap ditindaklanjuti agar terdapat kedekatan antara petugas dengan sasaran.
- b. Tahap *assessment*, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki sasaran. Tahap ini dapat dilakukan secara individual dapat melalui tokoh masyarakat atau anggota masyarakat tertentu. Kebutuhan masyarakat dianalisis dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
 - c. Tahap perencanaan alternatif program, dilakukan dengan mengajak warga berdiskusi dan berfikir terkait program atau kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dimana petugas bertindak sebagai fasilitator masyarakat.
 - d. Tahap pemformulasian rencana aksi, pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok merumuskan usulan-usulan dalam mengatasi permasalahan yang ada terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan ke pihak penyandang dana.
 - e. Tahap pelaksanaan, merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam pemberdayaan, karena suatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak

ada kerja sama antar pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerja sama antarwarga.

- f. Tahap evaluasi proses dan hasil perubahan. Pada tahap ini warga dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat. Keterlibatan warga diharapkan akan membentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Akan tetapi, kadangkala dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bila hal ini terjadi maka evaluasi proses diharapkan akan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program ataupun kegiatan.
- g. Tahap terminasi, merupakan tahap di mana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terkadang terminasi dilakukan bukan karena masyarakat sudah mandiri, tetapi tidak jarang karena program atau kegiatan sudah berhenti atau sudah melebihi jangka waktu atau anggaran sudah selesai.

4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan pemberdayaan seperti yang

dikemukakan oleh Rukminto Adi adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Usaha dalam meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin (dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia) berkembang.
- c. Kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya semakin meningkat.
- d. Peningkatan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, semakin rapi sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- e. Kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan juga mengalami peningkatan. Ini ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari berkurangnya penduduk miskin, usaha yang berkembang, kepedulian terhadap kesejahteraan meningkat, kemandirian masyarakat juga meningkat, dan terjadi pemerataan pendapatan yangmana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya.

²⁷ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan....*, hal. 16

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait program pemberdayaan ekonomi juga telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan telah dipublikasikan dalam berbagai karya, baik dalam jurnal atau yang lainnya. Berikut hasil karya terdahulu dari akademisi, yaitu:

Penelitian dari Karlina Batik dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).²⁸ Dalam implementasi PM2L terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan koordinasi, sosialisasi, penerapan aksi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Secara garis besar tahapan-tahapan yang dilalui dalam implementasi program belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam tahap koordinasi, kegiatan yang dilakukan memang tidak terjadi tumpang tindih, namun masih belum terjadi sinkronisasi kegiatan. Dalam tahap sosialisasi, ternyata sosialisasi hanya dilakukan sampai pada level pemerintah desa dan belum ke masyarakat sasaran. Dari penerapan aksi yang dilaksanakan ternyata banyak terjadi penyimpangan terhadap aturan, baik oleh SKPD maupun masyarakat. Tahap pembinaan tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran untuk pembinaan dari pihak kabupaten. Dalam tahap monitoring, SKPD dan SM2L saling mengandalkan dalam memonitoring penerima bantuan PM2L. Dalam tahap evaluasi, berorientasi pada realisasi fisik dan penyerapan keuangan saja, belum sampai kepada penilaian hasil kinerja secara fungsional kegiatan pada tahap pembinaan karena tidak tersedianya anggaran untuk pembinaan dari pihak

²⁸ Karlina Batik, et.al., "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L); Studi Kasus di Dua Desa Tertinggal di Kalimantan Tengah", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013, Hal. 92- 115

kabupaten. Persamaan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan terletak pada jenis penelitian (kualitatif) dan tema penelitian (pemberdayaan ekonomi). Sedangkan perbedaannya adalah jenis program yang diteliti dan lokasi penelitian.

Selanjutnya Arianne Sarah melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi program pendidikan keuangan serta hasil yang dirasakan oleh perempuan anggota Koperasi Teratai Putih di Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam Program Pendidikan Keuangan.²⁹ Diketahui bahwa program pendidikan keuangan yang dilakukan di Koperasi Teratai Putih memenuhi elemen – elemen dari model implementasi menurut David C. Korten, yakni (1) adanya program yang disusun dengan matang, (2) pelaksana atau fasilitator program memahami tugasnya dengan baik dan (3) program sesuai dengan kebutuhan sasaran program. Hasil dari implementasi program pendidikan keuangan yang dijalankan oleh para peserta menunjukkan hasil yang baik sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat di lihat dari indikator literasi keuangan menurut Chen dan Volpe, seperti pengetahuan dasar pengelolaan keuangan peserta telah membuat anggaran rumah tangga secara sederhana, kesadaran untuk mendahulukan menabung ke dalam post-post keuangan, mempersiapkan dana hari tua, terlibat dalam lembaga keuangan formal yakni koperasi, dan kesadaran berwirausaha. Persamaan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan terletak pada jenis penelitian kualitatif dan tema penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis program, lokasi penelitian dan rumusan masalah yang diteliti.

²⁹ Arianne Sarah, *Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan: Studi Kasus Anggota Perempuan Koperasi Teratai Putih Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017

Program dalam penelitian peneliti adalah Jalin Matra PFK dengan lokasi penelitian di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung sedangkan program dalam penelitian Arianne Sarah adalah program pendidikan keuangan pada Koperasi Keuangan Teratai Putih Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Wahyu Tjiptaningsih, hasil penelitiannya berjudul Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon).³⁰ Dalam penelitian ini pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui strategi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan sudah dilakukan dengan baik dan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi hal ini terlihat dari rata-rata pendapatan dari Rp. 15.200 menjadi Rp. 20.000 per orang. Hambatan yang ada dalam proses pemberdayaan perempuan di Desa Sindangkempeng adalah sarana dan prasarana yang belum optimal, minimnya kapasitas SDM perempuan, terbatasnya akses jaringan pemasaran produk serta terbatasnya bantuan permodalan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga adalah memperkuat kelembagaan KWT Medel Sekar Wangi, meningkatkan kualitas SDM perempuan dan meningkatkan permodalan. Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan dan tema dalam penelitian (pemberdayaan ekonomi). Perbedaan dalam penelitian ini pada rumusan masalah yang diteliti, lokasi dan jenis program.

³⁰ Wahyu Tjiptaningsih, "Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga; Studi Kasus pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon", *Jurnal Reformasi*, Vol.2, No.1, Maret 2017, hal. 28-35

Dalam penelitian Wahyu berfokus pada pelaksanaan, hambatan dan upaya. Sedangkan rumusan masalah peneliti berfokus pada implementasi, dampak dan keberhasilan dari program.

Selanjutnya penelitian dari Sudarmiani dan Waini Astuti melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.³¹ Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKS di Desa Sukorejo ini berjalan cukup baik dalam kegiatan simpan pinjam. Peran para kader UPPKS di Desa Sukorejo yaitu sebagai fasilitator dalam menyampaikan aspirasi anggota kepada penyelenggara program, mengatur dan mencatat setiap administrasi (keuangan) anggota dan mengurus jadwal pertemuan (rapat anggota) pada kelompok UPPKS Desa Sukorejo. Komponen-komponen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan UPPKS di Desa Sukorejo adalah Kelurahan Desa Sukorejo, PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Kecamatan Saradan, dan BKKBN. Hambatan dalam program UPPKS ini, yaitu adanya anggota yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok UPPKS, kader yang kurang cekatan dalam menangani masalah yang ada pada anggotanya dan adanya anggota yang pindah domisili sehingga anggota UPPKS menjadi berkurang serta pelatihan dan sosialisasi yang kurang maksimal dalam kelompok UPPKS di Desa Sukorejo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada tema penelitian (pemberdayaan ekonomi), jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data yang menggunakan

³¹ Sudarmiani dan Waini Astuti, "Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 7, No. 2, Juli 2019, hal. 116-124

wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada tujuan, lokasi dan program yang diteliti. Program yang diteliti oleh Sudarmiani dan Waini Astuti adalah program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Tujuan penelitian yang dilakukan Sudarmiani dan Waini Astuti untuk mengetahui pelaksanaan, peran kader, komponen pendukung dan hambatan dalam kegiatan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Jalin Matra PFK dan menganalisis dampak serta keberhasilan program.

Galeh Itamaji dan Witjaksono Eko Hartoto juga melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Program Paket Masa Depan dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pra Sejahtera di Pedesaan.³² Kesimpulan dalam penelitian ini diketahui bahwa program PMD mampu memberdayakan masyarakat miskin perempuan peserta program PMD khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Limbangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin perempuan peserta program PMD. Masyarakat miskin perempuan peserta PMD mayoritas tidak lagi tergantung dari pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan sri-hari ditunjukkan dari jawaban responden yang mana 80% responden merasa kesejahteraannya meningkat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah pada metode penelitian dan tema penelitian (pemberdayaan). Perbedaannya terletak pada lokasi, tujuan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian Galeh dan Witjaksono

³² Galeh Itamaji dan Witjaksono Eko Hartoto, "Kontribusi Program Paket Masa Depan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pra Sejahtera di Pedesaan", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 25, No.1, 2018, hal. 82-88

tujuan penelitian hanya untuk mengetahui kontribusi program. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan tujuannya untuk mengetahui implementasi, dampak dan keberhasilan program. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian Galeh dan Witjaksono melalui angket dan wawancara. Peneliti sendiri menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selanjutnya penelitian Dwi Listia Rika Tini dengan judul Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sumenep.³³ Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif yang dilaksanakan di Kabupaten Sumenep di bawah naungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) berupa kelompok-kelompok Usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga agar bisa hidup berkecukupan dan dapat meringankan beban dari suami. Program UEP di Kabupaten Sumenep ini memfokuskan Usaha Ekonomi Produktifnya pada pengrajin yang ada di setiap Desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tahap kegiatan pengembangan UEP ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan yang dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan rencana pentahapannya di tahun pertama (tahun 2013) yaitu Tahap Penumbuhan, tahun kedua (tahun 2014) adalah Tahap Pengembangan dan tahun ketiga (tahun 2015) Tahap Kemandirian. Dari kegiatan yang dijalankan di Kabupaten Sumenep memberikan dampak positif terhadap perempuan-perempuan yang ada di pedesaan, mereka dapat menghasilkan uang dan membantu para suami tanpa

³³ Dwi Listia Rika Tini, "Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.2, No.1, Oktober 2019, hal. 148 - 156

harus bekerja jauh diluar rumah. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan tema penelitian (pemberdayaan). Perbedaanya terletak pada tujuan penelitian, lokasi dan program yang diteliti. Program dalam penelitian adalah mneliti tentang pengembangan Program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) di Kabupaten Sumenep. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang Program Jalin Matra PFK di Desa Salakkembang yangmana program ini berfokus pada rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan.